MEWUJUDKAN TRANSPORTASI MASSAL TERPADU BERBASIS TATA RUANG

MEWUJUDKAN TRANSPORTASI MASSAL TERPADU BERBASIS TATA RUANG

Saat ini Jakarta menghadapi permasalahan yang krusial dan kompleks di bidang transportasi kota. Perlu adanya ketersediaan sistem dan infrastruktur transportasi massal yang terpadu, yang bisa melayani kebutuhan perpindahan warganya dengan cepat, aman, nyaman, murah, serta massal. Demikian diungkapkan Dosen Transportasi Universitas Trisakti Fransiskus Trisbiantara dalam Obrolan Tata Ruang Bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Radio Trijaya FM Jakarta (4/8).

Ditambahkan oleh Fransiskus, penyediaan angkutan massal merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemacetan yang dihadapi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tentunya konsep tersebut harus didahului dengan perencanaan yang matang dan berbasis rencana tata ruang (RTR). Hal ini karena RTR merupakan suatu prasyarat yang baik dan bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur. “tata ruang, selain mengarahkan kemana potensi yang ada dapat tergali, juga menyalurkan potensi yang sudah ada agar menjadi kompetitif,” imbuhnya.

Ada beberapa keuntungan penyelesaian masalah transportasi dengan penyediaan angkutan massal dbandingkan pembangunan jalan baru. Angkutan massal mampu menampung penduduk di sebuah kota dalam jumlah besar serta berpotensi menjadi penggerak pusat-pusat perekonomian yang ada di sekitarnya. Sedangkan investasi infrasruktur jalan memang mempunyai nilai yang cukup besar.

Tetapi, bila kemudian penggunaan lahannya tidak tepat, maka investasi yang besar tadi akhirnya tidak memberikan manfaat yang optimal. Misalnya, pembangunan jalan bypass untuk kecepatan tinggi dan antar kota. Namun tidak lama setelah dibangun, di sepanjang jalan muncul pasar, akhirnya pemanfaatan tidak sesuai tujuan semula. “Di sisi lain, pembangunan jalan baru juga membuka peluang bertambahnya jumlah kendaraan pribadi,” tegas Fransiskus.

Direktur Penataan Ruang Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat mengatakan, penyediaan

angkutan massal sebagai solusi masalah kemacetan di Jakarta telah diakomodir dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw). Masyarakat dapat turut berperan dan menjadi sosial kontrol dalam kegiatan public hearing penyusunan rtrw. Terkait penempatannya, angkutan massal sebisa mungkin dekat dengan pusat-pusat keramaian seperti perumahan, rumah susun, perdagangan, perkantoran, dan sebagainya. Bahkan di Singapura atau Korea, angkutan massal ditempatkan di tengah kota yang dekat dengan mall.

Lebih jauh Iman menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan RTR kawasan metropolitan untuk nantinya disahkan menjadi Peraturan Presiden. Antara lain RTR kawasan metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), Makassar-Maros-Sangguminasa-Takalar (Mamminasata), Banjarmasin Raya, Cekungan Bandung, dan sebagainya. Perlunya konsistensi dan dukungan Pemda setempat yang termasuk dalam kawasan metropolitan tersebut untuk turut menyelesaikan masalah transportasi. “Bentuk kekonsistenan tersebut dituangkan dalam RTRW kabupaten/kota yang saat ini dalam tahap penyusunan,” ujar Iman.

Fransiskus menegaskan, dua hal penting yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta dan antisipasi bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Yakni, mengenali potensi daerah masing-masing untuk nantinya dikembangkan dan menerapkan budaya planning dalam setiap aktivitas. (nik)

Pusat Komunikasi Publik

050810